

ABSTRAK

UPAYA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) BANDAR LAMPUNG DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL MELALUI APLIKASI BELANJA ONLINE

(e-commerce)

(Studi pada BBPOM di Bandar Lampung)

Oleh

Belita Aryani Putri

Kosmetik kala ini menjadi suatu produk yang banyak dicari, meningkatnya kepedulian individu dalam merawat diri menjadi salah satu faktornya, termasuk di daerah Lampung kedudukan kosmetik dapat dikatakan menjadi salah satu kebutuhan primer bagi semua kalangan, baik wanita, pria, anak kecil maupun dewasa, sehingganya persebaran kosmetik dipasaran sangat luas, ditambah lagi akibat dari majunya teknologi dengan munculnya aplikasi belanja online yang makin meningkatkan tingkat pembelian produk kosmetik. Dibalik kemudahan berbelanja kosmetik melalui aplikasi belanja online tersebut, sudah dapat diprediksi adanya dampak negatif yang muncul, salah satunya ialah terjadinya persebaran kosmetik ilegal pada aplikasi belanja online. Dibawah naungan BPOM, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) sebagai unit pelaksana teknis yang bertugas untuk mengawasi peredaran obat dan makanan yang beredar di wilayah tertentu, tentunya ikut bertanggung jawab atas masalah ini, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan juga Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi tolak ukur dari BBPOM di Bandar Lampung sebagai salah satu Lembaga yang berwenang di daerah Lampung untuk bertindak dalam memberikan upaya dan strategi dalam membantu penanganannya, hal inilah yang menjadi pembahasan utama pada skripsi ini.

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yurisprudensi normatif dan empiris dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Adapun permasalahan pada skripsi ini adalah (1) Bagaimana upaya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung dalam penanggulangan peredaran kosmetik ilegal melalui aplikasi belanja online (*e-commerce*)?; (2) Apakah faktor penghambat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung dalam upaya penanggulangan peredaran kosmetik ilegal melalui aplikasi belanja online (*e-commerce*)? Sedangkan yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda Balai

Belita Aryani Putri

Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung bagian pidana. Prosedur pengumpulan data dalam penulisan pada penelitian ini menggunakan cara studi kepustakaan dan juga survei lapangan, dengan analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan juga pembahasan, dapat disimpulkan bahwasanya upaya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung dalam menanggulangi peredaran kosmetik melalui *e-commerce*, ialah mirip dengan teori upaya penanggulangan hukum oleh kepolisian, yaitu (a) Pre-emptif (b) Preventif (c) Represif dan (d) Operasi gabungan khusus. Lalu faktor penghambat dalam menanggulangi peredaran kosmetik ilegal melalui *e-commerce* ini adalah (a) Faktor hukumnya sendiri (b) Faktor penegak hukum (c) Faktor sarana atau fasilitas (d) Faktor masyarakat (e) Faktor Kebudayaan.

Berdasarkan dari analisa dan juga determinasi yang ada, maka saran dari penulis ialah, kerjasama antara masyarakat, kepolisian dan juga BBPOM harus ditingkatkan dengan menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan juga integrasi agar tingkat peredaran kosmetik ilegal secara *online* dapat berkurang dan juga BBPOM harus lebih meningkatkan kerjasama dengan instansi lain yang berkaitan, seperti Polisi, Direktorat Bea dan Cukai, Dinas Kesehatan dan juga Pengadilan, agar keterbatasan wewenang tidak menjadi penghambat dalam pemberantasan peredaran kosmetik ilegal secara *online*. Serta diharapkan masyarakat dapat merubah kebudayaan dalam memilah dan mencari informasi serta lebih kritis dalam membeli produk yang hendak digunakan.

Kata Kunci: Kosmetik, Peredaran, Penanggulangan

ABSTRACT

EFFORTS OF THE BANDAR LAMPUNG DRUG AND FOOD CONTROL OFFICE (BBPOM) IN COMBATING THE CIRCULATION OF ILLEGAL COSMETICS THROUGH ONLINE SHOPPING APPLICATIONS

(e-commerce)

(Study On BBPOM di Bandar Lampung)

By

Belita Aryani Putri

Cosmetics have become a highly sought-after product in recent times, with an increasing awareness among individuals regarding personal care as one of the driving factors. In Lampung, cosmetics are considered a primary necessity across all demographics, including women, men, children, and adults. As a result, the distribution of cosmetics in the market is widespread, further amplified by technological advancements, such as the emergence of online shopping applications, which have significantly boosted the purchasing of cosmetic products. However, alongside the convenience of purchasing cosmetics through these online platforms, it is evident that negative consequences have emerged, one of which is the spread of illegal cosmetics through e-commerce platforms.

Under the supervision of BPOM (National Agency of Drug and Food Control), the Bandar Lampung Drug and Food Control Office (BBPOM) plays a key role in overseeing the circulation of drugs and food within a specific area and is thus responsible for addressing this issue. This responsibility is based on Law No. 36 of 2009 concerning Health and Law No. 19 of 2016 on Information and Electronic Transactions. These laws serve as benchmarks for BBPOM in Bandar Lampung as one of the authoritative institutions in Lampung tasked with formulating efforts and strategies to manage this situation. This issue is the central focus of this thesis.

The research methodology applied in this study utilizes both normative and empirical juridical approaches, employing primary and secondary data sources. The research questions are as follows: (1) What are the efforts of the Bandar Lampung Drug and Food Control Office (BBPOM) in combating the circulation of illegal cosmetics through e-commerce platforms? (2) What are the hindering factors faced by the Bandar Lampung Drug and Food Control Office (BBPOM) in efforts to combat the circulation of illegal cosmetics via e-commerce platforms? The

Belita Aryani Putri

informants in this study include Pharmacist and Food Supervisors from BBPOM Bandar Lampung and academic experts from the Faculty of Law at the University of Lampung in the field of criminal law. Data collection procedures include literature study and field surveys, with data analysis conducted using qualitative analysis methods.

Based on the research findings and discussions, it can be concluded that the efforts of BBPOM in Bandar Lampung to combat the circulation of cosmetics through e-commerce platforms align with the legal measures taken by law enforcement agencies, including (a) Preemptive (b) Preventive (c) Repressive (d) Special joint operations. The hindering factors in addressing the circulation of illegal cosmetics via e-commerce are (a) Legal factors (b) Law enforcement factors (c) Facility or infrastructure factors (d) Societal factors (e) Cultural factors.

Based on the analysis and determination, the author suggests that cooperation between the public, law enforcement, and BBPOM should be strengthened through the principles of coordination, synchronization, and integration in order to reduce the spread of illegal cosmetics online. Furthermore, BBPOM should enhance collaboration with other relevant agencies, such as the police, Directorate General of Customs and Excise, the Ministry of Health, and the judiciary, to ensure that limitations in authority do not become barriers to tackling the circulation of illegal cosmetics online. Additionally, it is hoped that the public will change cultural habits regarding information selection and become more critical when purchasing products for personal use.

Keywords: Cosmetics, Circulation, Mitigation